



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 73 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II**

**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

Renja Badan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Badan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 73**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD Kabupaten Garut) Tahun 2019-2024, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022



tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RKPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Kabupaten Garut untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan "**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**". Pembangunan Kabupaten Garut dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Garut secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimumkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan RKPD Tahun 2023 di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

Untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 tersebut maka disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digunakan dalam mewadahi program dan kegiatan prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  31. Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 273);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan urusan Kesbangpol untuk periode 1 tahun berdasarkan rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Garut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai dasar untuk mewujudkan program dan kegiatan yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.



Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Garut, sebagai berikut :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023
2. Terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2022, sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi:

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tujuan dan sasaran penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi:

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Meliputi:

1. Rencana Kerja
2. Pendanaan Perangkat Daerah

### **BAB V : PENUTUP**

Meliputi:

1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
3. Rencana Tindak Lanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

**2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2021 telah melaksanakan 6 Program terdiri dari 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

Total anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.515.244.339,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp15.054.913.170,00 atau 97,03%.

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Outcome kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.309.899.389,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.913.923.670,00 atau 90,81%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp34.990.000,00 atau 99,97%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan SKPD sebanyak 2 Dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp34.990.000,00 atau 99,97%.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terpenuhinya dokumen keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.903.170.665,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.523.611.606,00 atau 90,28%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

### a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.887.578.665,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.508.019.606,00 atau 90,24%.

### b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.592.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp15.592.000,00 atau 100%.

## 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.378.500,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.378.500,00 atau 100%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

### a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya pakaian seragam dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya sebanyak 35 stel dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.378.500,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp11.378.500,00 atau 100%.

#### 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp280.384.759,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp280.264.259,00 atau 99,96%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tambahan jumlah komponen instalasi listrik sebanyak 7 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.800.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.800.000,00 atau 100%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 42 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.734.200,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp82.734.200,00 atau 100%.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 25 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.995.200,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp10.995.200,00 atau 100%.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 15 Jenis dengan alokasi

anggaran sebesar Rp62.610.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp62.610.000,00 atau 100%.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.414.800,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.414.800,00 atau 100%.

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu selama 1 Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.000.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp42.000.000,00 atau 100%.

g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.830.559,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp65.710.659,00 atau 99,82%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terpenuhinya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.862.665,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp41.210.705,00 atau 81,02%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebanyak 1149 Buah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp5.499.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.499.000,00 atau 100%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya pembayaran rekening telepon dan air selama 1 Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.165.760,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp8.513.801,00 atau 46,87%.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.197.905,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp27.197.905,00 atau 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.102.800,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp22.468.600,00 atau 77,20%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebanyak 16 Buah dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.922.800,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp15.922.800,00 atau 100%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebanyak 14 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.180.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.545.800,00 atau 49,66%.

## **B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Outcome kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila, dengan alokasi anggaran sebesar Rp388.405.100,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp385.465.100,00 atau 99,24%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan berikut:

### 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan yang Terfasilitasi, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp388.405.100,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp385.465.100,00 atau 99,24%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

#### a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp388.405.100,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp385.465.100,00



atau 99,24%. Peserta Kegiatan terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama sebanyak 835 orang yang dilaksanakan di 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Kegiatan terkait Wawasan Kebangsaan**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Bela Negara	Malangbong	28 Januari 2021	95 orang
2	Bela Negara	Sukawening	24 Februari 2021	95 orang
3	Bela Negara	Leles	23 Maret 2021	95 orang
4	Bela Negara	Mekarmukti	7 April 2021	95 orang
5	Bela Negara	Caringin	7 Juli 2021	95 orang
6	Bela Negara	Bl. Limbangan	16 Desember 2021	95 orang
7	Pembinaan Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila	Cikajang	19 Oktober 2021	55 orang
8	Pembinaan Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila	Cigedug	21 Oktober 2021	55 orang
9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tarogong Kidul	7 September 2021	60 orang
10	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Garut Kota	9 September 2021	60 orang
11	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Samarang	18 November 2021	35 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

**C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Outcome kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.090.561.200,00 dengan Capaian Target (72%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.088.881.200,00 atau 99,92%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan berikut:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.090.561.200,00 dengan Capaian Target (72%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.088.881.200,00 atau 99,92%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.999.800,00 dengan Capaian Target (72%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp108.319.800,00 atau 98,47%. Peserta Kegiatan terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama sebanyak 260 orang yang dilaksanakan di 4 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Daftar Kegiatan terkait Pendidikan Politik Bagi Masyarakat**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Samarang	6 Mei 2021	20 orang
2	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Cisewu	6 Juli 2021	80 orang
3	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Cikajang	13 Oktober 2021	80 orang
4	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Caringin	18 Oktober 2021	80 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.980.561.400,00 dengan Capaian Target (72%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.980.561.400,00 atau 100%. Peserta Kegiatan Pendidikan Politik terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama sebanyak 93 orang yang dilaksanakan di Bukit Alamanda Resort & Resto yang terletak di Kecamatan Samarang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Kegiatan terkait Pendidikan Politik**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pendidikan Politik	Bukit Alamanda Resort & Resto	8 April 2021	31 orang
2	Pendidikan Politik	Bukit Alamanda Resort & Resto	8 Juli 2021	31 orang
3	Pendidikan Politik	Bukit Alamanda Resort & Resto	21 September 2021	31 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

Kemudian Peserta Kegiatan Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik yang terdiri dari Pengurus Parpol sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Daftar Kegiatan terkait Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	26 Januari 2021	27 orang
2	Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	28 Januari 2021	27 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

Adapun rincian penerima hibah bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Daftar Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Tahun 2019	Besaran Bantuan Per Suara (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DPC PKB	149.307	1.500	223.960.500
2	DPD PKS	136.945	1.500	205.417.500
3	DPC PDIP	102.242	1.500	153.363.000
4	DPD GOLKAR	226.673	1.500	340.009.500

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Tahun 2019	Besaran Bantuan Per Suara (Rp)	Jumlah (Rp)
5	DPC GERINDRA	216.187	1.500	324.280.500
6	DPC DEMOKRAT	123.459	1.500	185.188.500
7	DPD PAN	119.570	1.500	179.355.000
8	DPC PPP	156.000	1.500	234.000.000
9	DPC HANURA	40.176	1.500	60.264.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.270.559</b>	<b>1.500</b>	<b>1.905.838.500</b>

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

#### **D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Outcome kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.943.467.200,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.942.067.100,00 atau 99,93%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan berikut:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.943.467.200,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.942.067.100,00 atau 99,93%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.943.467.200,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.942.067.100,00 atau 99,93%. Peserta Kegiatan Pembinaan Ormas diikuti oleh 340 orang utusan Ormas/LSM di Wilayah Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Daftar Kegiatan terkait Organisasi Kemasyarakatan**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Perundang-undang Ormas/LSM	Aula Kodim 0611 Garut	8 April 2021	80 orang
2	Sosialisasi Perundang-undang Ormas/LSM	Aula Kecamatan Cisewu	9 April 2021	80 orang
3	Peningkatan Peran dan Fungsi Ormas/LSM	Yonif 303 SSM Cisurupan	1-2 Desember 2021	180 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

Adapun rincian penerima hibah uang bagi organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan**

No	Nama Ormas	Besaran (Rp)
1	Dewan Harian Cabang 45 (DHC-45) Kabupaten Garut	200.000.000
2	Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kabupaten Garut	50.000.000
3	Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS)	50.000.000
4	Persatuan Wreadatama Pensiunan Sipil Republik Indonesia (PWRI)	125.000.000
5	DPC PEPABRI Kabupaten Garut	50.000.000
6	DPC. Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD)	50.000.000
7	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	50.000.000

No	Nama Ormas	Besaran (Rp)
8	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut (HMI)	50.000.000
9	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	50.000.000
10	PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	50.000.000
11	PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Garut	50.000.000
12	PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut	50.000.000
13	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM)	35.000.000
14	Gema Nusantara (GEMANTARA)	50.000.000
15	Yayasan Maju Bangkit Bersatu	35.000.000
16	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	25.000.000
17	Komando Kesiap - Siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BPO KOKAM)	50.000.000
18	Generasi Pemberdayaan Masyarakat (GAPERMAS) Kabupaten Garut	50.000.000
19	PC Perkumpulan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Garut (PP POLRI)	50.000.000
20	DPD Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan Kabupaten Garut	15.000.000
21	Yayasan Elfatih Kabupaten Garut	15.000.000
22	Komando Macan Asia	20.000.000
23	DPC XTC Indonesia Kabupaten Garut	50.000.000
24	MPC Pemuda Pancasila	100.000.000
25	DPC Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	100.000.000
26	Badan Pembina Citra (BPC) Siliwangi Kab. Garut	50.000.000
27	Forum Pemuda Peduli Garut	50.000.000
28	Persatuan Istri Veteran Indonesia (PIVERI) Kab. Garut	25.000.000
29	DPD LSM Naga Sukma Kabupaten Garut	25.000.000
30	LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Kab. Garut	15.000.000
31	DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Garut	15.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.600.000.000</b>

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

#### **E. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Outcome kinerja dari Program ini adalah Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp504.593.250,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp501.969.200,00 atau 99,48%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan berikut:

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi ketahanan ekososbud, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp504.593.250,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp501.969.200,00 atau 99,48%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp504.593.250,00 dengan Capaian Target (90%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp501.969.200,00 atau 99,48%. Peserta Kegiatan terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama sebanyak 582 orang yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 2.8**  
**Daftar Kegiatan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Aula Kecamatan Malangbong	18 Februari 2021	85 orang
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Aula Kecamatan Bungbulang	06 April 2021	85 orang
3	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Hotel Tempayan Kecamatan Tarogong Kaler	10 November 2021	26 orang
4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Hotel Tempayan Kecamatan Tarogong Kaler	18 November 2021	26 orang
5	Ketahanan Sosial	Aula Desa Padasuka Cikajang	14 September 2021	100 orang
6	Ketahanan Sosial	Aula Kecamatan Caringin	17 September 2021	100 orang
7	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	SMAN Kecamatan Cilawu	25 November 2021	100 orang
8	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Aula Desa Padasuka Kecamatan Cikajang	23 Desember 2021	60 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

Selain kegiatan diatas, pada Tahun 2021 juga terbit Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### **F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Outcome kinerja dari Program ini adalah Terwujudnya Penurunan Konflik Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.278.318.200,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat

direalisasikan sebesar Rp6.222.606.900,00 atau 99,11%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan berikut:

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Outcome kinerja dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya kewaspadaan dini yang terfasilitasi, Kerjasama inteljen, Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Pemantauan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Penanganan konflik daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.278.318.200,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.222.606.900,00 atau 99,11%, yang diimplementasikan ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.043.116.000,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.001.516.000,00 atau 99,18%. Peserta/personil kegiatan sebanyak 7078 orang. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Daftar Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang**  
**Kewaspadaan Dini**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta/Personil
1	Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021	Wilayah Kabupaten Garut	24-25 Maret 2021	1465 orang
			14-15 April 2021	
2	Pengaman Hari-Hari Besar (Idul Fitri)	Wilayah Kabupaten Garut	13-14 Mei 2021	1656 orang
	Pengamanan Titik Rawan	Wilayah Kabupaten Garut	6-7 Mei 2021	
	Pengamanan Penyekatan Lalu Lintas	Wilayah Kabupaten Garut	6-15 Mei 2021	
3	Pengaman Hari-Hari Besar (Natal dan Tahun Baru)	Wilayah Kabupaten Garut	25 dan 31 Desember 2021	3312 orang
	Pengamanan Titik Rawan	Wilayah Kabupaten Garut	25-26 Desember 2021	
	Pengamanan Penyekatan Lalu Lintas	Wilayah Kabupaten Garut	30-31 Desember 2021	
4	Pelatihan/Sosialisasi Kegiatan Sistem Informasi Intelejen	Hotel Alamanda Manalusu	29-30 November 2021	150 orang
5	Pembinaan/Sosialisasi Kegiatan Penanganan Konflik	Bukit Alamanda Resort & Resto	16 Maret 2021	50 orang
		Bukit Alamanda Resort & Resto	14 September 2021	50 orang
		Bukit Alamanda Resort & Resto	2 Desember 2021	50 orang
6	Sosialisasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaku Kerawanan Stabilitas serta Pengawasan Aktivitas Orang Asing Kab. Garut	Bukit Alamanda Resort & Resto	19 September 2021	69 orang
		Bukit Alamanda Resort & Resto	24 November 2021	69 orang

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta/Personil
7	Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Bukit Alamanda Resort & Resto	2 Februari 2021	25 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	27 Juni 2021	34 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	29 Juli 2021	34 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	30 Agustus 2021	34 orang
7	Workshop Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Hotel Alamanda Pantai Manalusu	21 Desember 2021	80 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Output dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.235.202.200,00 dengan Capaian Target (100%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.221.090.900,00 atau

98,86%. Peserta/personil kegiatan sebanyak 32532 orang. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Daftar Kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini**

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta/Personil
1	Pengamanan Unjuk Rasa dan Pengamanan Rutin	Wilayah Kabupaten Garut	1 Januari – 31 Desember 2021	31440 orang
2	Sosialisasi Kegiatan Tim Koordinasi Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Gangguan Keamanan dalam Daerah	Gedung LEC Garut	23-24 November 2021	400 orang
3	Sosialisai Kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Bukit Alamanda Resort & Resto	23-24 November 2021	200 orang
4	Rapat Tim Koordinasi Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Gangguan Keamanan dalam Daerah	Bukit Alamanda Resort & Resto	12 Januari 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	16 Pebruari 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	12 Maret 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	19 April 2021	41 orang

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta/Personil
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	19 Mei 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	24 Juni 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	29 Juli 2021	41 orang
		Bukit Alamanda Resort & Resto	12 Agustus 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	9 September 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	14 Oktober 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	22 November 2021	41 orang
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut	2 Desember 2021	41 orang

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2022 telah melaksanakan 6 Program terdiri dari 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

Total anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.851.548.553,00 dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp8.428.455.454,00 atau 47,21%.

#### **A. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila, dengan alokasi anggaran sebesar Rp479.830.000,00 dengan capaian Target (90%) dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp66.292.700,00 atau 13,82%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan

#### **B. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Pemahaman Politik Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.678.868.500,00 dengan capaian Target (72%) dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.449.188.300,00 atau 91,43%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

#### **C. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp366.970.000,00 dengan capaian Target (90%) dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp63.947.000,00 atau 17,43%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### **D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Ormas Aktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.177.413.600,00 dengan capaian Target (90%) dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp 24.880.000,00 atau 0,78%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:



1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

#### **E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Penurunan Konflik Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.734.154.900,00 dengan capaian Target (100%) dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp3.872.455.800,00 atau 57,50%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

#### **F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.414.311.553,00 dengan capaian Target (100%)

dan sampai Triwulan II 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp1.951.691.654,00 atau 44,21%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

### **2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 yaitu:

**“Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa”**

Untuk pencapaian tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Garut menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Kebebasan Sipil;
2. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol.

Ke-3 sasaran diatas perlu ditempuh melalui proses manajemen yang baik supaya terciptanya sinergitas antara Perencanaan Daerah, Provinsi dan Pusat, sehingga akan mempermudah pengembangan “*sharing*” pembiayaan dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk program-program yang akan dilakukan. Rencana kerja berguna sebagai rujukan dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2021 di sajikan pada tabel pada halaman berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
8										
8	01									
8	01	01								
8	01	01	2,01							
8	01	01	2,01	01						
8	01	01	2,01	07						
8	01	01	2,02							
8	01	01	2,02	01						
8	01	01	2,02	07						
8	01	01	2,05							
8	01	01	2,05	02						
8	01	01	2,06							
8	01	01	2,06	01						
8	01	01	2,06	02						
8	01	01	2,06	03						
8	01	01	2,06	05						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
8	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
8	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	100	49 Unit	49 Unit	100
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100
8	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
8	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100
8	01	02			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	100
8	01	02	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1395 Orang	874 Orang	835 Orang	835 Orang	100	1395 Orang	1395 Orang	100
8	01	03			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	72%	72%	72%	72%	100	72%	72%	100
8	01	03	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					<b>Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun								
8	01	03	2,01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	354 Orang	444 Orang	407 Orang	407 Orang	100	354 Orang	354 Orang	100
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Ormas Aktif	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	100
8	01	04	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	340 Orang	340 Orang	340 Orang	340 Orang	100	340 Orang	340 Orang	100
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	100
8	01	05	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	508 Orang	565 Orang	582 Orang	582 Orang	100	508 Orang	508 Orang	100
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN</b>	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									
8	01	06	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2913 Orang	14256 Orang	7078 Orang	7078 Orang	100	2913 Orang	2913 Orang	100
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	53568 Orang	9836 Orang	32532 Orang	32532 Orang	100	53568 Orang	53568 Orang	100
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tahun 2022 adalah tahun ketiga dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP			150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	340 Orang dan 59 Ormas/ Lsm		150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	
2	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan			1360 Orang	1360 Orang	1360 Orang	1360 Orang	835 Orang		1360 Orang	1360 Orang	
3	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban		3215	31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	39610 Orang		31800 Orang	31800 Orang	
4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu		3,199	72%	n/a	72%	72%	78,91%		72%	72%	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

**Tabel 2.13**  
**Sasaran 1 (Terwujudnya Kebebasan Sipil)**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Target Tahun 2022	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	94%		90%	√		90%
2	Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi	95%		90%	√		90%
3	Persentase Ormas Aktif	93%		90%	√		90%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

**Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 1 :**

Pada tahun 2022, Hasil dari Indikator Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila adalah sebesar \*) dari target 90%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pencapaian indikator Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila adalah tetap.

Pada tahun 2022, Hasil dari Indikator Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi adalah sebesar \*) dari target 90%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pencapaian indikator Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi adalah tetap.

Pada tahun 2022, Hasil dari Indikator Persentase Ormas Aktif adalah sebesar \*) dari target 90%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pencapaian indikator Persentase Ormas Aktif adalah tetap.

**Tabel 2.14**  
**Sasaran 2 (Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat)**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Target Tahun 2022	Tercapai/ Tidak	Hasil sampai dengan 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	89%		72%	√		72%
2	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%		100%	√		100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

**Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 2 :**

Pada tahun 2022, Hasil dari Indikator Persentase Pemahaman Politik Masyarakat adalah sebesar \*) dari target 72%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pencapaian indikator Persentase Pemahaman Politik Masyarakat adalah tetap.

Pada tahun 2022, Hasil dari Indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial adalah sebesar \*) dari target 100%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pencapaian indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial adalah tetap.

**Tabel 2.15**  
**Sasaran 3 (Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol)**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Target Tahun 2022	Tercapai/ Tidak	Hasil sampai dengan 2022	Target Akhir Renstra
1	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan	100%		100%	√		100%

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Target Tahun 2022	Tercapai/Tidak	Hasil sampai dengan 2022	Target Akhir Renstra
	Kesatuan Bangsa dan Politik						

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

### **Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 3 :**

Pada tahun 2022, Hasil dari Indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar \*) dari target 100%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka pencapaian indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah tetap.

Dari sisi capaian kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2021 sudah menunjukkan progres yang menggembirakan dengan capaian 97,03% dan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebesar 47,21%, dengan uraian sebagai berikut :

a. Kegiatan yang melebihi target

Kegiatan yang melebihi target kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sebagaimana ditetapkan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2021 tidak ada.

b. Kegiatan yang telah memenuhi target

Seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi target sebagaimana

ditetapkan pada Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- c. Kegiatan yang belum atau tidak memenuhi target  
Kegiatan yang belum atau tidak memenuhi target kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sebagaimana ditetapkan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2021 tidak ada.
- d. Faktor penyebab tercapainya seluruh target kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana Kerja untuk tahun 2021 sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut  
Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan

teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-Isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah :

1. Masuknya Era Globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
3. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab

**Berdasarkan Isu-Isu penting tersebut diatas, masalah mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah :**

1. Pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di daerah dengan membuka komunikasi dan integrasi sosial

politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen masyarakat.

2. Peningkatan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Garut
3. Perlunya pendataan dan pembinaan LSM, Ormas, Organisasi Politik serta Organisasi Masyarakat lainnya, dalam rangka pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara tujuan dengan sasaran, strategi dengan kebijakan serta keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.16 berikut.



**Tabel 2.16**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
	<b>8.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>135.296.883.844</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>135.296.883.844</b>	
	<b>8.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	Kab. Garut	100%	<b>10.581.132.844</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	Kab. Garut	100%	<b>10.581.132.844</b>	
	<b>8.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>137.378.150</b>	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>137.378.150</b>	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Dokumen	10.593.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Dokumen	10.593.750	
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	
	8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	
	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	
	8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.446.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.446.000			
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	102.338.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	102.338.400			
<b>8.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>3.788.798.589</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>3.788.798.589</b>			
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	35 Orang/bul	3.770.798.589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	35 Orang/bul	3.770.798.589			
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000			
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	13.000.000			
<b>8.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>5.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>5.000.000</b>			
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000			
8.01.01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>74.570.300</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>74.570.300</b>			
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	35 Paket	20.650.300	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	35 Paket	20.650.300			
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000			
8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000			
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	35 Orang	43.920.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	35 Orang	43.920.000			
<b>8.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>669.966.900</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>669.966.900</b>			
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Garut	1 Paket	12.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Garut	1 Paket	12.800.000			

		Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan				Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan				
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	60.176.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	60.176.400		
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	5.696.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	5.696.800		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	65.000.000		
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Dokumen	9.612.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Dokumen	9.612.000		
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	1 Laporan	81.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	1 Laporan	81.700.000		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	210.386.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	210.386.000		
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	16.681.100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	16.681.100		
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	207.914.600	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	207.914.600		
<b>8.01.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>5.730.470.450</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>5.730.470.450</b>		
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	435.592.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	435.592.000		
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Unit	101.520.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Unit	101.520.000		
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut	2 Unit	30.930.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut	2 Unit	30.930.000		
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	30 Unit	162.428.450	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	30 Unit	162.428.450		
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	5.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	5.000.000.000		
<b>8.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>54.158.455</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>54.158.455</b>		
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	1 Laporan	6.960.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	1 Laporan	6.960.000		
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	20.000.550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	20.000.550		
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kab. Garut	1 Laporan	27.197.905	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kab. Garut	1 Laporan	27.197.905		

	<b>8.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Disediakan <b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>120.790.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Disediakan <b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>120.790.000</b>	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut	15 Unit	76.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut	15 Unit	76.750.000	
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut	3 Unit	29.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut	3 Unit	29.840.000	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Garut	10 Unit	14.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Garut	10 Unit	14.200.000	
	<b>8.01.02.</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA</b>	Kab. Garut	90%	<b>1.082.150.200</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA</b>	Kab. Garut	90%	<b>1.082.150.200</b>	
	<b>8.01.02.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>1.082.150.200</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>1.082.150.200</b>	
	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	6.000.000	
	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	4.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	4.000.000	
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	2000 Orang	518.900.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	2000 Orang	518.900.000	
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab. Garut	100 Orang	190.575.400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab. Garut	100 Orang	190.575.400	

	8.01.02.2,01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan	Kab. Garut	1 Laporan	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan	Kab. Garut	1 Laporan	12.000.000	
	8.01.02.2,01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Garut	500 Keluarga	350.674.800	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Garut	500 Keluarga	350.674.800	
	8.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT</b>	Kab. Garut	72%	<b>108.613.502.700</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT</b>	Kab. Garut	72%	<b>108.613.502.700</b>	
	8.01.03.2,01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>108.613.502.700</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>108.613.502.700</b>	
	8.01.03.2,01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	6.000.000	
	8.01.03.2,01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Kab. Garut	1 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Kab. Garut	1 Dokumen	4.000.000	

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				
8.01.03.2,01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	3000 Orang	108.579.502.700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	3000 Orang	108.579.502.700	
8.01.03.2,01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	200 Orang	12.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	200 Orang	12.000.000	
8.01.03.2,01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	12.000.000	
8.01.04.		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>PERSENTASE ORMAS AKTIF</b>	Kab. Garut	90%	3.310.321.500	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>PERSENTASE ORMAS AKTIF</b>	Kab. Garut	90%	3.310.321.500	
8.01.04.2,01.		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	3.310.321.500	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	3.310.321.500	
8.01.04.2,01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	Kab. Garut	1 Dokumen	9.792.400	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	Kab. Garut	1 Dokumen	9.792.400	

		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				
8.01.04.2,01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	7.953.500	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	7.953.500	
8.01.04.2,01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	1000 Orang	3.254.031.700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	1000 Orang	3.254.031.700	
8.01.04.2,01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	100 Orang	27.455.900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	100 Orang	27.455.900	
8.01.04.2,01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	11.088.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	11.088.000	
<b>8.01.05.</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSBUD YANG TERFASILITASI</b>	Kab. Garut	90%	<b>1.050.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSBUD YANG TERFASILITASI</b>	Kab. Garut	90%	<b>1.050.000.000</b>	
<b>8.01.05.2,01.</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>1.050.000.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>1.050.000.000</b>	
8.01.05.2,01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	15.371.100	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	15.371.100	
8.01.05.2,01.02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Kab. Garut	1 Dokumen	7.214.900	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Kab. Garut	1 Dokumen	7.214.900	

		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					
8.01.05.2.01.03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	2500 Orang	995.142.700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	2500 Orang	995.142.700		
8.01.05.2.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	100 Orang	23.195.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	100 Orang	23.195.000		
8.01.05.2.01.05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	9.076.300	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	9.076.300		
<b>8.01.06.</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kab. Garut	100%	<b>10.659.776.600</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kab. Garut	100%	<b>10.659.776.600</b>		
<b>8.01.06.2.01.</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>10.659.776.600</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	<b>10.659.776.600</b>		
8.01.06.2.01.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	10.000.000		
8.01.06.2.01.02		Penyusunan Bahan Perumusan	Jumlah Kebijakan di Bidang	Kab.	1 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Bahan Perumusan	Jumlah Kebijakan di Bidang	Kab.	1 Dokumen	5.500.000		



		Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Garut				Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Garut					
	8.01.06.2,01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	14000 Orang	2.951.135.000		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	14000 Orang	2.951.135.000			
	8.01.06.2,01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	28000 Orang	4.400.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	28000 Orang	4.400.000.000			
	8.01.06.2,01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	5.500.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	5.500.000			
	8.01.06.2,01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	3.287.641.600		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	3.287.641.600			
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>135.296.883.844</b>		<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>135.296.883.844</b>	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Garut khususnya Musrenbang Tingkat Kecamatan, bahwa terdapat 27 usulan dan 2 pokok dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.17**  
**Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARA/ VOLUME	CATATAN
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Caringin	Pembinaan Politik		
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Cikajang	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Kadungora	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Caringin	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Sukaresmi	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)		
7	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Pamulihan	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Kecamatan Garut Kota	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)		

	Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
9	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Cikajang	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		
10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Caringin	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		
11	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Garut Kota	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Peundeuy	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		
13	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Bl. Limbangan	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		
14	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		
15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Kersamanah	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya		
16	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Cikajang	Pembinaan Kewaspadaan Dini		
17	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan Kewaspadaan Dini		
18	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Caringin	Pembinaan Kewaspadaan Dini		
19	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Cikajang	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan		

			Karakter Kebangsaan		
20	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
21	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
22	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Caringin	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
23	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Tarogong Kidul	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
24	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Garut Kota	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
25	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Kadungora	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
26	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Samarang	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
27	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Garut Kota	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		
28	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Garut Kota	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan		Pokir
29	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		Pokir

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Rangka mewujudkan sinergitas perencanaan, maka sebagai kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah turut memperhatikan pula arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Tema Pembangunan Nasional yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sesuai dengan Tema Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat dan fokus kebijakan operasional pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke sektor atau lokasi lain;
2. menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3. memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;

4. reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;
5. melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Disamping itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman terhadap tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yaitu “**Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat**” 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Selanjutnya yaitu telaahan visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati Garut yang merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah Kabupaten terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan bidang kesbangpol dalam

lima tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya ancaman/tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Garut terpilih yang penyusunannya mengacu kepada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2019-2024 adalah:

**“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ✓ **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera**: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

**1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.**

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

**2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.**

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.



**3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.**

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

**4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.**

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut selaku salah satu lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Garut memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan (*Misi 1 RPJMD TAHUN 2019-2024*) Pemerintah Kabupaten Garut yaitu : **“Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”**. Dari misi ke satu tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Meningkatkan kualitas kesalehan sosial masyarakat”**

Di dalam mendukung capaian sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut telah menentukan tujuan Sasaran program dan kegiatan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sehubungan dengan tujuan Sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Garut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 3.2.1. Rumusan Tujuan Dalam Renstra

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Bakesbangpol menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Misi kesatu yaitu “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan sesuai tujuan Bakesbangpol yaitu: “Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa”.

#### 3.3.2. Rumusan Sasaran Dalam Renstra

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut, Rencana Strategis Bakesbangpol periode 2019-2024 menetapkan tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya Kebebasan Sipil;
2. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol;

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan rancangan akhir Revisi Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Garut telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1	Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	72,14
		1 Terwujudnya Kebebasan Sipil	1 Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Persen	75
			2 Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Persen	80

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
		2 Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	1 Tingkat Kebebasan Berpendapat	Persen	90
			2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	Persen	72
		4 Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol	1 Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Sangat Baik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

### 3.3. Program dan Kegiatan

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

GERAKAN BESAR & BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB
<b>GERBANG NEGERI</b> (GERAKAN ELEMEN BANGSA MEMBANGUN NEGERI MELALUI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORKEMAS)	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b> -Pemantauan dan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat, Ekonomi masyarakat, SDA dalam peningkatan ketahanan bangsa -Pemahaman Nilai-nilai budaya luhur budaya bangsa -Fasilitasi pencapaian holaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan ketahanan bangsa	<b>BAKESBANGPOL</b>
<b>GARDANI</b> (GERAKAN KEWASPADAAN DINI MELALUI FASILITASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA INTELIJEN, PENGAWASAN ORANG ASING DAN PENANGANAN KONFLIK)	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b> -Pemantauan dan pengawasan orang asing -Pencegahan dan penanggulangan konflik -Tim Koordinasi Mitra Bakesbangpol dalam penanganan gangguan keamanan di daerah -Bimtek Sistem Informasi Intelegen -Forum Kewaspadaan dini masyarakat	<b>BAKESBANGPOL</b>
<b>GOTIK</b> (GERAKAN POLITIK MASYARAKAT MELALUI PEMBINAAN DAN DIKLAT BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT, PELAJAR MAHASISWA, ASN, KADES DAN ORKEMAS)	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK DAN PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b> - Pendidikan Politik bagi masyarakat - Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol - Peningkatan kapasitas bela negara	<b>BAKESBANGPOL</b>

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Kerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TA. 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Persen	75
		Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Persen	80
2	Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Persen	90
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	Persen	72
3	Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Sangat Baik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

Program/kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Garut mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Garut.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah TA. 2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET AKHIR PERIODE
1.	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Persentase Ormas Aktif	90%	90%	90%	90%	90%
4.	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	72%	72%	72%	72%	72%
5.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

#### **4.2 Pendanaan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan forum SKPD yang dilakukan Bakesbangpol, maka bila seluruh program kegiatan yang diusulkan diakomodasi pada tahun 2023, total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan adalah

sebesar Rp135.296.883.844,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Total anggaran tersebut direncanakan didapatkan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (DAU) sebesar Rp135.296.883.844,00 serta anggaran Banprov dan Anggaran Pusat (DAK) sebesar Rp0,00. Selain program dan kegiatan dan sub kegiatan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota/desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan evaluasi terhadap aspek keuangan dalam mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Dalam mengukur kinerja aspek keuangan, dilakukan melalui perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan strategik. Analisis *Efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan *Analisis efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (*outcomes*). Evaluasi efektifitas dan efisiensi ini kemudian disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Tabel 4.3**

#### **Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8						01						135.296.883.844		130.604.850.376					
8						01						10.581.132.844		6.138.969.876					
8						01						137.378.150		130.000.000					
8						01						10.593.750		5.000.000					
8						01						4.750.000		5.000.000					
8						01						4.750.000		5.000.000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
8	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000	
8	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000	
8	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	5.446.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	100 %	5.000.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
8	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	102.338.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100.000.000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>3.788.798.589</b>				<b>3.835.000.000</b>			
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	35 Orang/bul	89 Kategori Sangat Baik	3.770.798.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	3.800.000.000
8	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol ran	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>5.000.000</b>			<b>35.000.000</b>			
8	01 01 2,03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>74.570.300</b>			<b>250.000.000</b>			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	35 Paket	89 Kategori Sangat Baik	20.650.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	10.000.000
8	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000
8	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	35 Orang	89 Kategori Sangat Baik	43.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100.000.000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>669.966.900</b>			<b>438.052.180</b>			
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	10.000.000
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	60.176.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan	100 %	90.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Politik									Politik				
8	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	5.696.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	103.052.180
8	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	9.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat	100 %	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
8	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	81.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	80.000.000
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	210.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100.000.000
8	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	16.681.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat	100 %	5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
8	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	207.914.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	20.000.000
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>5.730.470.450</b>		<b>1.045.000.000</b>			
8	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Unit	89 Kategori Sangat Baik	435.592.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	440.000.000

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	3 Unit	89 Kategori Sangat Baik	101.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100.000.000
8	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	2 Unit	89 Kategori Sangat Baik	30.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	30.000.000
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	30 Unit	89 Kategori Sangat Baik	162.428.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	125.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol		100 %	1 Unit	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	0
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>54.158.455</b>		<b>95.917.696</b>				
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	6.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	10.000.000
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	20.000.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan	100 %	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Politik										Politik					
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	27.197.905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	29.917.696
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>120.790.000</b>		<b>280.000.000</b>			
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	15 Unit	89 Kategori Sangat Baik	76.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	3 Unit	89 Kategori Sangat Baik	29.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	15.000.000
8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut	100 %	10 Unit	89 Kategori Sangat Baik	14.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000
8	01	02			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>1.082.150.200</b>		<b>1.150.000.000</b>				
8	01	02	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>1.082.150.200</b>		<b>1.150.000.000</b>				
8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut	90 %	1 Dokumen	75 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut	90 %	1 Dokumen	75 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	25.000.000
8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut	90 %	2000 Orang	75 %	518.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	700.000.000
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut	90 %	100 Orang	75 %	190.575.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	50.000.000
8	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut	90 %	1 Laporan	75 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2,01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut	90 %	500 Keluarga	75 %	350.674.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	300.000.000
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							108.613.502.700			109.745.559.000			
8	01	03	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							108.613.502.700			109.745.559.000			
8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut	72 %	1 Dokumen	72 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	72 %	25.000.000
8	01	03	2,01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut	72 %	1 Dokumen	72 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	72 %	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut	72 %	3000 Orang	72 %	108.579.502.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	72 %	109.595.559.000
8	01	03	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut	72 %	200 Orang	72 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	72 %	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut	72 %	1 Laporan	72 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	72 %	50.000.000
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>							3.310.321.500			3.310.321.500			
8	01	04	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>							3.310.321.500			3.310.321.500			
8	01	04	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1 Dokumen	90 %	9.792.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	25.000.000
8	01	04	2,01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1 Dokumen	90 %	7.953.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	25.000.000
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1000 Orang	90 %	3.254.031.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Ormas Aktif	90 %	3.160.321.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							Umum								
8	01	04	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	100 Orang	90 %	27.455.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	50.000.000
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1 Laporan	90 %	11.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	50.000.000
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								<b>1.050.000.000</b>				<b>1.050.000.000</b>	
8	01	05	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>								<b>1.050.000.000</b>					<b>1.050.000.000</b>
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1 Dokumen	90 %	15.371.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	25.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	2,01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1 Dokumen	90 %	7.214.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	25.000.000
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	2500 Orang	90 %	995.142.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	900.000.000
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	100 Orang	90 %	23.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8 01 05 2,01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut	90 %	1 Laporan	90 %	9.076.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	50.000.000	
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>							<b>10.659.776.600</b>						<b>9.210.000.000</b>	
8 01 06 2,01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							<b>10.659.776.600</b>							<b>9.210.000.000</b>
8 01 06 2,01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	90 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	10.000.000	
8 01 06 2,01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	90 %	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	50.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut	100 %	14000 Orang	90 %	2.951.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	2.650.000.000
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut	100 %	28000 Orang	90 %	4.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	4.400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	90 %	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	100.000.000
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	90 %	3.287.641.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	2.000.000.000
<b>TOTAL</b>													<b>135.296.883.844</b>				<b>130.604.850.376</b>	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2022)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 yang memuat prioritas kegiatan dan Pendanaan indikatif. Kondisi terjadinya pandemi global Covid-19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
- c. Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
- d. Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.
- e. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kewenangannya.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program program yang direncanakan maka perlu diupayakan:

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat; dan
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**